

Judul : Kebijakan fiskal kredibel, bangga yakin target ekonomi bisa tercapai
Tanggal : Sabtu, 06 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kebijakan Fiskal Kredibel

Banggar Yakin Target Ekonomi Bisa Tercapai

SENAYAN menyambut baik arah Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 Presiden Prabowo Subianto. Namun pengawasan dan tata kelola yang baik harus diperketat agar seluruh kebijakan fiskal bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Anggota Banggar DPR Ecky Awal Mucharam mengatakan, penyampaian langsung KEM-PPKF oleh Presiden menjadi momentum berharga karena biasanya hal itu dilakukan Menteri Keuangan. Ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah membangun kebijakan fiskal yang kredibel serta berpihak kepada rakyat.

Diketahui, dalam penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Rapat Paripurna

DPR bulan lalu, Prabowo optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 bisa mencapai 5,8 hingga 6,5 persen. Target itu diyakini bisa tercapai melalui strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, sebagai pijakan menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Pertumbuhan ekonomi nasional itu, kata Prabowo, juga harus tecermin langsung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat luas.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun jadi 6,0 hingga 6,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen dengan rasio gini membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367.

Ecky melanjutkan, target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen yang disampaikan Presiden merupakan sasaran yang optimistis sekaligus menantang.

"Jika pertumbuhan mampu menembus angka 6 persen, itu jadi sejarah baru setelah satu dekade ekonomi Indonesia tertahan di level sekitar 5 persen," terangnya, Jumat (5/6/2026).

Pemerintah juga menjaga target inflasi pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Optimisme itu, menurut Ecky, bisa dicapai melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan geopolitik dunia. Sinergi kuat sangat dibutuhkan di tengah kondisi ekonomi global yang masih terus bergejolak.

Satu perhatian utama pihaknya adalah tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBC) yang mendapat alokasi anggaran besar bagi 68 juta penerima manfaat. Anggaran itu harus dipastikan untuk pelayanan peningkatan gizi masyarakat. Pengawasan ketat wajib dilakukan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pada sektor pendidikan, dia meminta Pemerintah memastikan alokasi anggaran tetap terjaga dengan baik. Fokus utama diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, tunjangan profesi, serta tunjangan pendidikan lainnya.

"Pemerintah juga harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur sekolah yang memadai di berbagai daerah," ingatnya.

Keberlanjutan berbagai pro-

gram perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, sambungnya, juga harus terus dijaga secara konsisten. Bantuan itu meliputi jaminan kesehatan nasional, program Indonesia Pintar, subsidi LPG, serta subsidi listrik. Jaminan kesehatan harus merata agar tidak ada warga sakit yang telantar tanpa pengobatan.

Selanjutnya, dia meminta Pemerintah mengkomunikasikan arah kebijakan fiskal 2027 secara terbuka kepada publik. Transparansi itu agar masyarakat memahami alokasi anggaran negara.

"Seluruh kebijakan keuangan itu memang diarahkan sepenuhnya untuk mendorong kesejahteraan rakyat secara luas dan merata," katanya.

Anggota Banggar DPR Cornelis

menambahkan, optimisme Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional patut diapresiasi.

Namun target tinggi itu wajib diikuti langkah konkret yang mampu menjawab berbagai persoalan bangsa. Strategi nyata harus dipersiapkan guna menghadapi tantangan di sektor energi, minyak, dan gas bumi.

Potensi penurunan produksi migas nasional kini jadi perhatian utama karena berdampak pada ketahanan energi. Kondisi itu juga memengaruhi penerimaan negara secara signifikan.

"Sektor migas sejauh ini masih jadi penopang pendapatan negara bukan pajak serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional," jelasnya.

Karena itu, dia meminta Pemerintah segera mengantisipasi penurunan produksi melalui perluasan ruang investasi eksplorasi yang masif. Langkah lainnya meliputi percepatan pengembangan lapangan migas baru di berbagai wilayah potensial. Pemerintah juga perlu memanfaatkan teknologi maju yang lebih efisien pada sektor hulu migas nasional.

Optimisme Pemerintah dalam KEM-PPKF 2027 diharapkan dapat diwujudkan melalui kebijakan yang terukur. Implementasi program harus berbasis pada kondisi riil di lapangan.

"Seluruh langkah strategis itu wajib memberikan manfaat nyata yang berujung pada peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya. ■ **PIB**